



Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Laporan Keuangan

Semester 1 Tahun 2024



DIPA 005.04-2-401665-2024
BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB
Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua,
Kota Lhokseumawe, Aceh.



0645-43925



ms-lhokseumawe.go.id



ms.lhokseumawe@gmail.com



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lhokseumawe, 30 Juni 2024

Pengguna Anggaran,



Yusuf Luthfi, SH

NIP. 197612292003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
F. Pengungkapan Penting Lainnya	30
VI. Lampiran dan Daftar	39
Lampiran A1 Rincian Aset Per 31 Juni 2024	40



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809

website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Lhokseumawe, 30 Juni 2024
Ketua Pengguna Anggaran,

Yanis Luthfi, SH
NIP. 197612292003121001

Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Semester I Tahun 2024 Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp17.262.000,-** atau mencapai persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp43.192.000**

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 32.658.500** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp, 32.658.500,-** Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar **Rp,36.658.500,-** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp0** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp 36.658.500** dan **Rp.(4.000.000,-)**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar **Rp.17.362.500,-** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. 39.400.000** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (22.037.500)** Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp0** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp. (22.037.500)**

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar **Rp0** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(22.037.500)** dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp0** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp(4.000.000)** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai **Rp(4.000.000)**.

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Th. 2024					Th. 2023
	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan	B.1	-				
pendapatan PNPB	B.1	43.192.000	17.362.500	(25.829.500)	40	16.605.000
JUMLAH PENDAPATAN		43.192.000	17.362.500	(25.829.500)	40	16.605.000
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3					
Belanja Barang	B.4	76.850.000	34.360.000	(42.490.000)	45	30.150.000
Belanja Modal	B.5					
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
JUMLAH BELANJA		76.850.000	34.360.000	(42.490.000)	45	30.150.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHKSEUMAWE
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

[illegible]

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	17.362.500	16.605.000
JUMLAH PENDAPATAN		17.362.500	16.605.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	1.500.000	2.683.955
Beban Barang dan Jasa	D.4	12.500.000	8.040.000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	25.400.000	20.460.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		39.400.000	31.183.955
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(22.037.500)	(14.578.955)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22.037.500)	(14.578.955)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(22.037.500)	(14.578.955)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-22.037.500	-14.578.955
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	18.037.500	14.278.955
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		-4.000.000	-300.000
EKUITAS AKHIR	E.6	- 4.000.000	- 300.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan Jalan Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan
-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga

perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseum telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Rincian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	43.192.000	43.192.000
Jumlah Pendapatan	43.192.000	43.192.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	76.850.000	34.360.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	76.850.000	34.360.000

Pendapatan

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp17.362.500 atau mencapai 39,97% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp43.192.000. Pendapatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseum adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	43.192.000	17.262.500	39,97
Jumlah	43.192.000	17.262.500	39,97

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 mengalami kenaikan/(penurunan) sebesar 4,56% dibandingkan 2023. Hal ini disebabkan rasio pendaftaran perkara yang meningkat.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.362.500	16.605.000	4,56
Jumlah	17.362.500	16.605.000	4,56

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp17.362.500,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Negara.
Rp34.360.000,-

Realisasi Belanja Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp834.360.000 atau 44,71% dari anggaran belanja sebesar Rp76.850.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	76.850.000	34.360.000	44,71
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	76.850.000	34.360.000	44,71

Dibandingkan dengan Semester I TA 2023, Realisasi Belanja Semester I TA 2024 mengalami kenaikan/(penurunan) sebesar 37,13%. Hal ini disebabkan antara lain:

Rasio realisasi meningkat

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023

Uraian	2017	2016	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	-
Belanja Barang	34.360.000	30.150.000	13,96
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	34.360.000	30.150.000	13,96

Realisasi Belanja
Barang
Rp34.360.000,-

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp34.360.000 dan Rp30.0150.000. Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2024 mengalami kenaikan/(penurunan) 13.96% dari Realisasi Belanja Barang 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan di Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Bahan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023

[illegible]

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp0

Jumlah Aset Lancar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp4.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp4.000.000** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	4.000.000	4.000.000
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	4.000.000	4.000.000

Kas di bendahara
Penerimaan Rp0

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2023 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	0	0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp27.618.500** dan **Rp15.171.000**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	4.000.000	4.000.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	27.618.500	15.171.000
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	31.618.500	19.171.000

C.1.10 Persediaan

Persediaan
Rp1.040.000

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp1.040.000** dan **Rp0**.

Rincian Persedian TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	1.040.000	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	1.040.000	0

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C. 3 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp36.658.500

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempk dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp36.658.500** dan **Rp19.471.000**

C. 3.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp4.000.000

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp4.000.000** dan **Rp4.000.000**, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp30.418.500

C. 3.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp30.418.500** dan **Rp15.171.000**, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Utang kepada Pihak Ketiga	30.418.500
2	Utang yang belum ditagih	2.240.000
3	Uang muka dari KPPN	4.000.000
	Total	36.658.500

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada **Treasury National Pooling (TNP)** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Uang Makan Pegawai bulan Juni yang belum dibayarkan kepada para pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

C. 3.3. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp36.658.500

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp36.658.500** dan **Rp19.417.000**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan

belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Uang Titipan Pihak Ketiga	30.418.000	15.171.000
GU Yang belum dipertanggung jawabkan	2.240.000	300.000
Uang Muka dari KPPN	4.000.000	4.000.000
Jumlah	36.658.000	19.471.000

Ekuitas

Rp(4.000.000)

C. 4. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp(4.000.000)** dan **Rp(300.000)** Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP
Rp17.362.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp17.362.500 dan Rp16.605.000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0,00%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.362.500	16.605.000	456,19%
Pendapatan Lain - lain	0	0	0,00%
Jumlah	17.362.500	16.605.000	456,19%

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang merupakan belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp.1.500.000,-

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan periode 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.500.000** dan **Rp2.683.955** Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.500.000	2.683.955	(44,11)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	1.500.000	2.683.955	(44,11)

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp12.500.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 30 Juni 2024 dan periode 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp12.500.000** dan **Rp8.040.000** Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultasi	12.500.000	8.040.000	55,47
Beban Langganan Listrik dan Telpon	0	0	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	0	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0,00
Jumlah Beban	12.500.000	8.040.000	55,47

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp25.400.000,-*

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan periode 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp25.400.000** dan **Rp20.460.000**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan periode 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Biasa	25.400.000	20.460.000	24,14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah Beban	25.400.000	20.460.000	24,14

D.5 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2024 dan periode 30 Juni 2023

D.6 Surplus/ Defisit LO

*Surplus/Defisit LO
Rp. (42.328.955)*

Surplus/Defisit LO terdiri dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional dan juga Pos Luar Biasa. Periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp(22.037.500)** dan **Rp (14.578.955)**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp0

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(22.037.500)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(22.037.500)** dan **Rp(14.578.955)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E. 3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp18.037.500

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp18.037.500** dan **Rp14.278.955**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	18.037.500
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	18.037.500

E. 4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp(4.000.000)

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2023 masing-masing Adalah sebesar **Rp(4.000.000)** dan **Rp(300.00)**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

a. Penjelasan Umum

- 01 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA.
- 02 Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.
- 03 Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses persidangan berlangsung dan semata mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri). Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut.
- 04 Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses

dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industri.

05 Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:

1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan
2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.

b. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. HIP (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Her Rechtswezen in De

Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya. Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak- pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris.
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh Petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut.
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan dalam APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan

manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank persepsi.

4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk membayar biaya PNBPN sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk menambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara.
6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN.

Keadaan Biaya Perkara

Keadaan biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2024 sebagai berikut:

Tabel 2 Keadaan Biaya Perkara per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	Rp. 15.731.500	-
2	Penerimaan	Rp. 121.847.500	-
3	Biaya Proses/ATK/ Pemberkasan	-	Rp. 13.810.000
4	Biaya Panggilan	-	Rp. 40.850.000
5	Biaya Penerjemah	-	-
6	Biaya Pemberitahuan	-	Rp. 9.758.000
7	Biaya Sita	-	-
8	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	Rp. 5.675.000
9	Biaya Sumpah	-	-
10	Biaya Pengiriman	-	Rp. 300.000
11	Materai	-	Rp. 1.640.000
12	PNBP	-	Rp.
13	Biaya Pendaftaran	-	Rp. 5.700.000
14	Biaya Penyampaian Relaas	-	Rp. 5.680.0000
15	Redaksi	-	Rp. 1.640.000
16	Pengembalia Sisa Panjar	-	Rp. 33.884.000
	Jumlah	Rp. 137.579.000	Rp.118.737.000
	Saldo Akhir	Rp. 18.842.000	
	Saldo Bank	Rp. 11.198.500	
	Saldo Kas Tunai	Rp. 7.643.500	

Jumlah saldo sebesar Rp.137.579.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Akhir Rp. 15.731.500
2. Kas tunai Rp. 7.643,500
3. Saldo bank Rp. 11.198.500

Penjelasan Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara

Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268/SEK/01/V/2010 Tanggal 24 Mei 2010 tentang Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara, rekapitulasi setoran PNPB yang berasal dari sisa biaya perkara dan jasa giro yang berasal dari simpanan uang di bank yang berkaitan dengan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

Penjelasan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

Setoran PNPB dari Sisa biaya perkara	Rp	0,-
--------------------------------------	----	-----

lewat 6 bulan
setelah pemberitahuan

Setoran PNPB dari jasa giro rekening	Rp	0,-
--------------------------------------	----	-----

biaya perkara

Uang Panjar Biaya Eksekusi Putusan

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran

(kreditur) tidak mau menerima.

Tabel 3 Keadaan Keuangan Titipan Pihak Ketiga
1 Januari s.d. 30 Juni 2024

No.	Uraian	Keadaan Keuangan			
		Saldo awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Biaya Perkara	15.731.500	121.847.500	118.737.000	18.842.000
2	Biaya Eksekusi	0	0	0	0
3	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0
	JUMLAH	15.731.500	121.847.500	118.737.000	18.842.000

Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Perkara dan Proses Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, pada Pengadilan tingkat pertama biaya proses diatur dan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat pertama. Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe biaya proses yang dipungut adalah Rp 75.000.000 untuk setiap perkara. Penggunaan biaya ini menggunakan sistem subsidi silang. Biaya proses (biaya pemberkasan) dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Materai
2. Biaya Redaksi
3. ATK
4. Penggandaan fotokopi berkas perkara/ surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
5. Konsumsi persidangan
6. Penggandaan salinan putusan
7. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
8. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara setelah diminutasi
9. Biaya penyelesaian perkara

10. Insentif tim pengelola biaya proses
11. Pengarsipan berkas perkara
12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

F. 2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.213/SEK.MS.W1-A5/SK.KU1.1.1/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran/PPK : Yarvis Luthf, S.H.

Peneliti SPP & Penanda Tangan SPM : Abdul Mutalib, A.Md SH.,MH.

Bendahara Pengeluaran : Amirul Haq,S.H.I

Bendahara Pengeluaran : Siti Hartina Silalahi, A.Md. AB

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai: Ikhsan, ST

Staff Pengelola Keuangan /Operator : Slamet Riyadi, S.Kom

Staff Pengelola Keuangan/Operator : Siti Mawaddah, S.Sos.I

F.3 PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

- Nihil

F.2.2. Pengungkapan Capaian Output

LAPORAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

PERIODE JUNI 2024

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI

Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi

Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Fungsi : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan

Sub Fungsi : Layanan Dukungan Manajemen

Ko de	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuann	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1053 BCA	Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah	Rp 2.700.000	Rp -	0	9	5	Perkara	49,98	
1053 QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseoranga	Rp 30.000.000	Rp 12.500.000	41,67	269	141	Orang	52,42	
1053 QCA	Perkara Hukum Perseorangan	Rp 44.150.000	Rp 21.860.000	49,51	-	-	-	-	
	001 Perkaradilingku ngan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya	Rp 21.000.000	Rp 12.900.000	61,43	60	33	Perkara	59,67	
	002 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Rp 23.150.000	Rp 12.900.000	38,7	40	14	Perkara	39,5	

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I

Kode dan Nama UAKPA : (401665) KANTOR MAHKAMAH SYAR'IAH LHKSEUMAWE

Kode dan Nama UAPPAW : (0600) MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Kode dan Nama Eselon 1 : (05) BADAN PERDILAN AGAMA

Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	V	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidakesesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidakesesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V
	a. Pagu/DIPA		V
	b. Estimasi PNBP		V
	c. Belanja		V
	d. Pengembangan Belanja		V
	e. Pendapatan		V
	f. Pengembangan Belanja		V
	g. Kas BLU		V

	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal)		V	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak

	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		V	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		V	Tidak
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		V	Tidak
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		V	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		V	Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		V	Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?		V	Tidak



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 401665
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	76,850,000	76,850,000	0
2	Belanja	34,360,000	34,360,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	43,192,000	43,192,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	17,362,500	17,362,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	4,000,000	4,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	4,000,000	4,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOK SEUMAWE 401665

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	43,192,000	17,362,500	(25,829,500)	40	49,973,000	16,605,000	33,368,000	33
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	43,192,000	17,362,500	(25,829,500)	40	49,973,000	16,605,000	33,368,000	33
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	43,192,000	17,362,500	(25,829,500)	40	49,973,000	16,605,000	33,368,000	33
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	76,850,000	34,360,000	(42,490,000)	45	76,850,000	30,150,000	46,700,000	39
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal	76,850,000	34,360,000	(42,490,000)	45	76,850,000	30,150,000	46,700,000	39
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOK SEUMAWE 401665

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	6	7	8	9
							10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	76,850,000	34,360,000	(42,490,000)	45	76,850,000	30,150,000	46,700,000
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
LHOKSEUMAWE, 22 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.
197612292003121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 005 MAHKAMAH AGUNG
: 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
: 0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
: 401665 MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/07/24 11:53 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	20,000	1,090,000	0	1,090,000	5450
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	16,760,000	5,700,000	0	5,700,000	34.01
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	26,412,000	10,572,500	0	10,572,500	40.03
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	43,192,000	17,362,500	0	17,362,500	40.2
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	43,192,000	17,362,500	0	17,362,500	40.2
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	43,192,000	17,362,500	0	17,362,500	40.2
	JUMLAH PENDAPATAN	43,192,000	17,362,500	0	17,362,500	40.2

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	4,000,000	0	4,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	27,618,500	0	27,618,500	0.00
Persediaan	1,040,000	0	1,040,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	32,658,500	0	32,658,500	
JUMLAH ASET	32,658,500	0	32,658,500	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	30,418,500	0	30,418,500	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	2,240,000	0	2,240,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	4,000,000	0	4,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	36,658,500	0	36,658,500	
JUMLAH KEWAJIBAN	36,658,500	0	36,658,500	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(4,000,000)	0	(4,000,000)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(4,000,000)	0	(4,000,000)	()
JUMLAH EKUITAS	(4,000,000)	0	(4,000,000)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32,658,500	0	32,658,500	

Keterangan :
FINAL

LHOKSEUMAWE, 22 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.
197612292003121001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : 401665	MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl. Cetak 22/07/2024 11:54 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	4,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	27,618,500	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,040,000	0
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	2,800,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	27,618,500
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	2,240,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	4,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	34,360,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	17,362,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,040,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,090,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	5,700,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	10,572,500
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	12,500,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,400,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,500,000	0
JUMLAH			89,421,000	89,421,000

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 22 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.

197612292003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	34,360,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	17,362,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	1,090,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	5,700,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	10,572,500
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,500,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,500,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,360,000	0
JUMLAH			51,722,500	51,722,500

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 22 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.
197612292003121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,362,500	16,605,000	757,500	4.562
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	17,362,500	16,605,000	757,500	4.562
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	17,362,500	16,605,000	757,500	4.562
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	1,500,000	2,683,955	(1,183,955)	(44.112)
Beban Barang dan Jasa	12,500,000	8,040,000	4,460,000	55.473
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	25,400,000	20,460,000	4,940,000	24.145
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	39,400,000	31,183,955	8,216,045	26.347
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(22,037,500)	(14,578,955)	(7,458,545)	51.16
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22,037,500)	(14,578,955)	(7,458,545)	51.16
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(22,037,500)	(14,578,955)	(7,458,545)	51.16

Keterangan :

FINAL

LHOKSEUMAWE, 22 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.

197612292003121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 11:53 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22,037,500)	(14,578,955)	(7,458,545)	51.16
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	18,037,500	14,278,955	3,758,545	26.32
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,000,000)	(300,000)	(3,700,000)	1,233.3
EKUITAS AKHIR	(4,000,000)	(300,000)	(3,700,000)	1,233.3

Keterangan :
FINAL

LHOKSEUMAWE, 22 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.
197612292003121001

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
UAPPB-W : MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 28-06-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE
KODE UAKPB : 005.04.0600.401665.000.KD

KODE	U R A I A N	N I L A I
117111	Barang Konsumsi	1,040,000
Jumlah		1,040,000

Disetujui tanggal : 28-06-2024
Kuasa Pengguna Barang

Yarvis Luthfi, SH
NIP. 197612292003121001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401665 MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl.Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl.Cetak : 22/07/24 12:00 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,040,000
J U M L A H		1,040,000

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 24 November 2023 , DIPA-005.04.2.401665/2024

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE

KPPN : (089) Lhokseumawe

Satuan Kerja : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 1.200.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00156/KW/401665/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	1.760.000,00	28.172.793,00	28.732.793,00	1.200.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.760.000,00	28.172.793,00	28.732.793,00	1.200.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	1.760.000,00	14.232.793,00	14.792.793,00	1.200.000,00
	1. BP UP*)	1.760.000,00	13.940.000,00	14.500.000,00	1.200.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	292.793,00	292.793,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 2.800.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	1.200.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	1.200.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	1.200.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	1.200.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	1.200.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	2.800.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	4.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	4.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

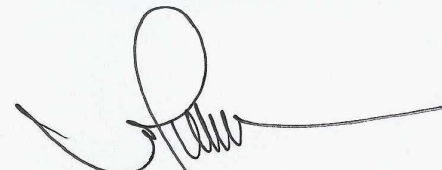
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



YARVIS LUTHFI, S.H.
NIP. 197612292003121001

KOTA LHOKSEUMAWE, 20 Juni 2024

Bendahara Pengeluaran



AMIRUL HAQ, S.H.I
NIP. 199005012014031001

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2024-06

Kode Satker : 401665

Kode KPPN : 089

Nama Satker : MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK
SEUMAWE

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
LHOK SEUMAWE

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	1

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.4,000,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.1,200,000.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.2,800,000.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.4,000,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.4,000,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 01 Juli 2024

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100124016651000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.200.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00156/KW/401665/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	1.200.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.200.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	1.200.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	1.200.000

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	1.200.000
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	1.200.000

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	1.200.000
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	2.800.000
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	4.000.000
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	4.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	4.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	4.000.000

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)


Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


AMIRUL HAQ, S.H.I
NIP. 199005012014031001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


YARVIS LUTHFI, S.H.
NIP. 197612292003121001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 401665

BULAN : JUNI 2024

NO NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	81001240166510 00	BPG 089 MAHKAMAH SYARIAH LHOKSEUMAWE	20	S- 2837/WPB.12/KP. 06/2021	11-11-2021	2024-06-20	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



AMIRUL HAQ, S.H.I

NIP. 199005012014031001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Propinsi / Kabupaten / Kota : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE
Satuan Kerja : (401665) MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOK SEUMAWE40166500-
No Rekening : 8100124016651000
Nama Rekening : BPG 089 MAHKAMAH SYARIAH LHOKSEUMAWE
Nama Bank : Bank Syariah Mandiri KC Lhokseumawe
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			0,00
05-06-2024	FPK-PENG- Irl0C4sl1ogGV9b	SPM GUP 240891305004402	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00
06-06-2024	FPK-PENG- 4Txim8OirlEpWyO	[DARI TUNAI] Penarikan GUP	0,00	3.940.000,00	0,00
07-06-2024	FPK-PENG- 4C3UBPGRo4LVMsd	SPM GUP 240891305004557	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
10-06-2024	FPK-PENG- Xx1YfqDkbv0MqDt	[DARI TUNAI] Penarikan GUP	0,00	3.640.000,00	0,00
11-06-2024	FPK-PENG- Z60C62n3h6zhUfV	SPM GUP 240891305004719	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12-06-2024	FPK-PENG- AGkDX7weKYGFrJUN	[DARI TUNAI] Penarikan GU	0,00	2.500.000,00	0,00
20-06-2024	FPK-PENG- 0JTxeSIkXVmkRn	SPM GUP 240891305005022	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00
20-06-2024	FPK-PENG- 35Oj1AvWKuLRZqs	[DARI TUNAI] Penarikan GU	0,00	3.860.000,00	0,00
Jumlah			13.940.000,00	13.940.000,00	0,00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWAWE (401665)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	089	410521	10-Jun-24	MAHKAMAH SYARIYAH LHOK SEUMAWAWE 001093871102000	38F8C2M2QE609KRO FT241624NFB8	411211	IDR	247,748	ADA
2	089	410521	10-Jun-24	MAHKAMAH SYARIYAH LHOK SEUMAWAWE 001093871102000	3E03B3IGA8OF0TRV FT2416293585	411124	IDR	45,045	ADA
TOTAL									292,793 -



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199005012014031001 pada 01-07-
2024 09:33:59 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Lhokseumawe - 089

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBP MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE (401665)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									
									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199005012014031001 pada 01-07-
2024 09:34:00 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Lhokseumawe - 089

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE (401665)

Cetak Tanggal 01-07-2024

Periode : 2024-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									
								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199005012014031001 pada 01-07-
2024 09:34:00 WIB.



REPORT SATKER

2024-06-01 s.d. 2024-06-30

Kementrian : MAHKAMAH AGUNG (005)
Eselon : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
Satker : MAHKAMAH SYARIAH LHK SEUMAWE - 401665 (401665)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILAG OPS (78111122275)
Rekening Satker : BPG 089 MAHKAMAH SYARIAH LHK SEUMA WE (8100124016651000)

Saldo Awal : Rp. 0
Total Debit : Rp. 13,940,000
Total Kredit : Rp. 13,940,000
Saldo Akhir : Rp. 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-05	09:33:09.0	3363192	SPAN-2408913050044020000001-Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan	0	0	3,940,000	3,940,000	CBS	
2024-06-06	15:00:31.0	3369061	KE	3,940,000	3,940,000	0	0	AT905103	
2024-06-07	15:09:02.0	3374194	SPAN-2408913050045570000001-Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan	0	0	3,640,000	3,640,000	CBS	
2024-06-10	12:32:40.0	3379146	KE	3,640,000	3,640,000	0	0	AT905109	
2024-06-11	14:32:10.0	3385149	SPAN-2408913050047190000001-Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan	0	0	2,500,000	2,500,000	CBS	
2024-06-12	08:14:00.0	3387206	KE	2,500,000	2,500,000	0	0	AT905103	
2024-06-20	08:55:27.0	3411235	SPAN-2408913050050220000001-Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan	0	0	3,860,000	3,860,000	CBS	
2024-06-20	12:41:19.0	3412199	KE 17136952368	3,860,000	3,860,000	0	0	CMS	
Total				0	13,940,000	13,940,000	0		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (06.54) ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE
 Satuan Kerja : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE
 Tgl. No. SP DIPA : 28 November 2023 , DIPA-005.04.2.401665/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (089) Lhokseumawe
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 27.618.500,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00014/PKB/401665/2024

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	13.253.500,00	29.594.500,00	15.229.500,00	27.618.500,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	13.253.500,00	29.594.500,00	15.229.500,00	27.618.500,00
B.	BP Selain Kas	13.253.500,00	29.594.500,00	15.229.500,00	27.618.500,00
	1. BP PNBP	0,00	2.229.500,00	2.229.500,00	0,00
	2. BP DPK	13.253.500,00	27.365.000,00	13.000.000,00	27.618.500,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	27.618.500,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	27.618.500,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (IA 1 kolom (6))	Rp	27.618.500,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	27.618.500,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	2.229.500,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	2.229.500,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	2.229.500,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	2.229.500,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	2.229.500,00
		(-)
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



YARVIS LUTHFI, S.H.
NIP. 197612292003121001

KOTA LHOKSEUMAWE , 01 Juli 2024

Bendahara Penerimaan



SITI HARTINA SILALAH, A.MD.A.B
NIP. 199609012020122006

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2024

Kedadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 27.618.500,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00014/PKB/401665/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	27.618.500
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	27.618.500
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	27.618.500
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	27.618.500
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	27.618.500
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	2.229.500
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	2.229.500
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	2.229.500
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

SITI HARTINA SILALAH, A.MD.A.B

NIP. 199609012020122006

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



YARVIS LUTHFI, S.H.

NIP. 197612292003121001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 401665 (MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOK SEUMAWE)

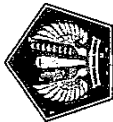
BULAN : JUNI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	8778788713	RPL 089 PDT MS LSW UTK PERKARA	BSI LHOKSEUMAWE	30	KPPN S-1191/ WPB.01/ KP.02/ 2021	04-08-2021	30-06-2024	27,618,500.00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal: 01-07-2024

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	089	401665	2024-06-26	Bendahara Penerimaan	4E0AB48VVET3VM1P	425232	IDR	30,000	ADA
					FT24178FM8B5				
2	089	401665	2024-06-26	Bendahara Penerimaan	4E0AB48VVET3VM1P	425233	IDR	460,000	ADA
					FT24178FM8B5				
3	089	401665	2024-06-26	Bendahara Penerimaan	4E0AB48VVET3VM1P	425239	IDR	540,000	ADA
					FT24178FM8B5				
4	089	401665	2024-06-05	Bendahara Penerimaan	936960NA04IUMB31	425233	IDR	10,000	ADA
					FT2415789MD6				
5	089	401665	2024-06-05	Bendahara Penerimaan	936960NA04IUMB31	425239	IDR	188,000	ADA
					FT2415789MD6				
6	089	401665	2024-06-12	Bendahara Penerimaan	6FAF561QV41EN1UD	425232	IDR	20,000	ADA
					FT24164CT7M7				
7	089	401665	2024-06-12	Bendahara Penerimaan	6FAF561QV41EN1UD	425233	IDR	360,000	ADA
					FT24164CT7M7				
8	089	401665	2024-06-12	Bendahara Penerimaan	6FAF561QV41EN1UD	425239	IDR	621,500	ADA
					FT24164CT7M7				



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199609012020122006 pada 01-07-
2024 16:47:44 WIB.

TOTAL

2,229,500

-

RPL 089 PDT MS LSW UTK PERKARA / IDR

Account : 8778788713
Date : 01 Jun 2024 - 30 Jun 2024
Opening Balance : IDR 13,253,500.00
Closing Balance : IDR 27,618,500.00
Total Debit Amount : IDR 13,000,000.00
Total Debit Record : 1
Total Credit Amount : IDR 27,365,000.00
Total Credit Record : 29
Branch : ID0018053

Date	FT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2024-06-03 08:53:28	FT24155SWNB4\BNK	1048018765 Trf Ke - IMRAN AR	IDR	13,000,000.00	DB		253,500.00
2024-06-03 18:21:25	FT24155TS9QK\Q53	LKP100042CASH-RPL 089 PDT MS LSW U Trf Dari - ZULFIKAR A	IDR	750,000.00		CR	1,003,500.00
2024-06-05 23:42:50	FT24157ZD3RD\BNK	MB BPI 6008915240604001 Trf Dari - ZULWANIS	IDR	205,000.00		CR	1,208,500.00
2024-06-05 09:57:55	FT241579LZY\Q14	Trf Dari - 451 - AZHARI	IDR	185,000.00		CR	1,393,500.00
2024-06-05 20:13:45	FT24157B97X8\BNK	MB BPI 6008915240605001 Trf Dari - HAMDANI	IDR	185,000.00		CR	1,578,500.00
2024-06-06 23:14:15	FT2415843LX3\BNK	MB BPI 6008915240605002 Trf Dari - SAMHUDDIN	IDR	765,000.00		CR	2,343,500.00
2024-06-06 11:48:13	FT24158BMK28\BNK	MB BPI 6008915240606001 Trf Dari - REVI SETIAWAN CAHYADI	IDR	765,000.00		CR	3,108,500.00
2024-06-06 15:00:17	FT24158HQRVM\BNK	MB BPI 6008915240605003 Trf Dari - WAHYU SAPUTRA	IDR	165,000.00		CR	3,273,500.00
2024-06-07 13:11:13	FT24159MTHX3\BNK	ATM BPI 6008915240606003 Trf Dari - 116 - SRI REZKY NOVIYANTI	IDR	765,000.00		CR	4,038,500.00
2024-06-07 16:41:27	FT24159MR789\BNK	MB BPI 6008915240607001 Trf Dari - AHMAD YANI	IDR	165,000.00		CR	4,203,500.00
2024-06-11 09:29:45	FT241636BN9H\BNK	MB BPI 6008915240610001 Trf Dari - MAULANA FAJRI	IDR	1,365,000.00		CR	5,568,500.00
2024-06-11 18:03:53	FT241631V2BJ\BNK	MB BPI 6008915240611002 Trf Dari - CHAIDIR ANHAR	IDR	765,000.00		CR	6,333,500.00
2024-06-13 12:07:47	FT24165JBF1L\J36	Perkara Eksekusi Ayu Anora Trf Dari - 451 - AYU ANORA	IDR	1,500,000.00		CR	7,833,500.00
2024-06-13 14:53:31	FT2416582KYG\J36	Perkara Eksekusi Ayu Anora yang ke 2 Trf Dari - 451 - AYU ANORA	IDR	13,500,000.00		CR	21,333,500.00
2024-06-13 19:35:12	FT2416594W0N	Trf Dari - 451 - ISHAQ	IDR	765,000.00		CR	22,098,500.00
2024-06-13 20:46:37	FT24165377TQG\BNK	MB BPI 6008915240613001 Trf Dari - NOVA PRIYANTI	IDR	155,000.00		CR	22,253,500.00
2024-06-15 13:33:59	FT241671N491\BNK	MB BPI 6008915240614002 Trf Dari - SYAFRIL HADI	IDR	165,000.00		CR	22,418,500.00
2024-06-15 17:14:24	FT24167P196S\Q53	byar perkara pengadilan Trf Dari - 451 - NARITA	IDR	765,000.00		CR	23,183,500.00
2024-06-19 16:47:49	FT241713RZ5L\P25	Trf Dari - 451 - ISMAIL	IDR	765,000.00		CR	23,948,500.00
2024-06-20 11:13:01	FT241722NKDY\BNK	MB BPI 6008915240620001 Trf Dari - QURRATUL AINI	IDR	165,000.00		CR	24,113,500.00
2024-06-20 11:47:16	FT2417221NQ2\BNK	MB BPI 6008915240620002 Trf Dari - CUYANDA ADISTYA	IDR	765,000.00		CR	24,878,500.00
2024-06-20 16:00:18	FT24172337J7\BNK	MB BPI 6008915240620003 Trf Dari - HENY NASLAWATY	IDR	765,000.00		CR	25,643,500.00
2024-06-20 22:03:36	FT24172P9763\BNK	MB BPI 6008915240620004 Trf Dari - HENY NASLAWATY	IDR	765,000.00		CR	26,408,500.00
2024-06-23 18:39:09	FT24175FJTPR\BNK	MB BPI 6008915240623001 Trf Dari - SYAUQAD	IDR	165,000.00		CR	26,573,500.00
2024-06-26 10:53:58	FT241781RJX7\P25	LKP100042DEBITCARD-RPL 089 PDT MS Trf Dari - FITRI AYU	IDR	165,000.00		CR	26,738,500.00
2024-06-27 10:29:25	FT24179TBP7W\BNK	MB BPI 6008915240626001 Trf Dari - FADLAN FITRI ADY	IDR	165,000.00		CR	26,903,500.00
2024-06-27 11:32:13	FT24179TWWVR\BNK	MB BPI 6008915240627001 Trf Dari - CUT ERNAWATI	IDR	165,000.00		CR	27,068,500.00
2024-06-28 10:30:16	FT24180WXXRY\BNK	MB BPI 6008915240627002 Trf Dari - SYAMSUL BAHRI	IDR	175,000.00		CR	27,243,500.00
2024-06-28 15:56:07	FT24180CS856\Q50	tambahan biaya perkara ikrar zakaria Trf Dari - 451 - HENY NASLAWATY	IDR	150,000.00		CR	27,393,500.00
2024-06-30 00:37:00	FT24182CTC7X\BNK	MB BPI 6008915240629001	IDR	225,000.00		CR	27,618,500.00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHKSEUMAWE

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh

Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809

website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email ms.lhokseumawe@gmail.com

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN (04) MAHKAMAH
SYAR'ITYAH LHKSEUMAWE**

Nomor : 346/SEK.MS.W1-A5/PL1.2.1/VI/2024

Nama Satker : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Kode Satker : 401665
UAPPB-W : Mahkamah Syar'iyah Aceh
UAPPB-E1 : Direktorat Jenderal Badan Urusan Administrasi

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Yarvis Luthfi, SH
NIP : 197612292003031001
Jabatan : Kasub Umum dan Keuangan
2. Nama : Roslia, SH
NIP : 197012201998032001
Jabatan : Kasub Umum dan Keuangan
3. Nama : Siti Mawaddah, S.Sos.I
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan *Stock Opname* barang persediaan Semester I Tahun 2024, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik (*Stock Opname*).

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Barang Persediaan (Opname Fisik).

1. Roslia, SH Kasubag Umum dan Keuangan

1.

2. Siti Mawaadah, S.Sos.I Operator Persediaan

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Barang
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Yarvis Luthfi, S.H.
NIP. 197612292003031001

BAHAN OPNAME

NO : 346 / S.E. MS. W.1 - AS / D.1.2.1 / 2024.

KODE UAKPB : 005.04.0600.401665.000.KD

Tanggal Cetak : 23/07/2024 11.13.01

UAKPB : MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tanggal Opnam : 30 Juli 2024

Halaman : 1 dari 1

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
1	1010301001000001	Pulpen	BH	0	
2	1010301006000001	Map Perkara	Lbr	0	
3	1010301006000002	Map Minutasi	Lbr	0	
4	1010301006000003	Map Putusan	Lbr	0	
5	1010301006000004	Map Salinan Putusan	Lbr	0	
6	1010301006000005	Pulpen	Bh	0	
7	1010302001000001	Kertas A4	Rem	0	
8	1010309001000001	Materai	Lbr	0	
9	1010399999000001	Blangko Akte Cerai	BUAH	5	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 005

: 401665

MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 24/07/24 9:28 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,000,000	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000	50	1,500,000
522131	Belanja Jasa Konsultansi	30,000,000	30,000,000	12,500,000	0	12,500,000	41.67	17,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	750,000	750,000	0	0	0	0	750,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,400,000	40,400,000	20,360,000	0	20,360,000	50.4	20,040,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	76,850,000	76,850,000	34,360,000	0	34,360,000	44.71	42,490,000
	JUMLAH RUPIAH MURNI	76,850,000	76,850,000	34,360,000	0	34,360,000	44.71	42,490,000
	TOTAL	76,850,000	76,850,000	34,360,000	0	34,360,000	44.71	42,490,000

PERIODE JUNI 2024

Kementerian Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL
Satuan Kerja : MAHKAMAH SYAR'İYAH LHKSEUMAWE
Fungsi : DUKUNGAN MANAJEMEN ADMNISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Sub Fungsi : PENINGKATAN MANEJEMEN PERADILAN
Program : PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
Lokasi : LHKSEUMAWE

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuann	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1053 BCA	Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah	Rp 2.700.000,00	Rp -	0	9	5	Perkara	49,98	
1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseoranga	Rp 30.000.000,00	Rp 12.500.000,00	41,67	269	141	Orang	52,42	
1053.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	Rp 44.150.000,00	Rp 21.860.000,00	49,51	-	-	-	-	
	001 Perkaradilingkung an Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya	Rp 21.000.000,00	Rp 12.900.000,00	61,43	60	33	Perkara	59,67	
	002 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Rp 23.150.000,00	Rp 12.900.000,00	38,7	40	14	Perkara	39,5	